



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka perlu penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 38) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Alokasi Dasar Adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
6. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, Luas Wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
8. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan Geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
9. Indeks Kesulitan Geografis desa yang selanjutnya disebut IKG desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar. Kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
10. Kantor Pelayan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat dengan Kepala DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser.
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Selanjutnya Disingkat dengan BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayr seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seleruh penerimaan daeah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat dengan PADes adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas Desa, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (13) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar penyaluran Dana Desa
- (5) Pemotongan Dana Desa dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran
- (6) Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa.
- (7) Pejabat Pembuat Komitmen yang ditetapkan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

- (8) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pejabat penandatanganan Surat Perintah membayar menerbitkan Surat Perintah membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  - (9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan surat Perintah Pencairan dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  - (10) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4).
  - (11) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Kepala BKAD Kabupaten Paser yang ditembuskan kepada Kepala DPMD Kabupaten Paser.
  - (12) Kepala KPPN menyampaikan salinan surat perintah pencairan Dana Penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepada Kepala BKAD Kabupaten Paser.
  - (13) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
    - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (13) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai Tata cara pembagian dan penetapan Rincian dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa Mengenai APBDes; dan
    3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
  - b. Tahap II tanpa dokumen :
  - c. Tahap III berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penerapan rincian Dana Desa setiap desa atau keputusan bupati mengenai penetapan rincian dana desa setiap desa;
    2. Peraturan desa mengenai APBDes;
    3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50%(lima puluh persen).
- (2) Bupati melalui Kepala BKAD bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
  - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BKAD.
  - (6) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) atas desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (7) Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (Hardcopy) dan atau dokumen elektronik (softcopy).
  - (8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Ditrektorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tambahan ketentuan :
  - a. Dana desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) kali , dengan besaran :
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
  - c. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (13) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.



- (2) Dalam hal desa telah salur dana desa tahap I, dan dapat disalurkan dengan persyaratan :
- a. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran;
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
  - b. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal desa telah salur dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (13) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala BKAD, dengan ketentuan:
- a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. Tahap III berupa :
    1. peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala BKAD, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I tanpa dokumen; dan
  - b. Tahap II berupa :
    1. Peraturan desa mengenai APBDes;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
    2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melalui Kepala BKAD menyampaikan dokumen persyaratan atas desa yang layak salur kepada KPPN selaku KPA penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Kepala BKAD untuk dilakukan pemutakhiran.
7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14A

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
  - c. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal desa telah salur dana desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
    1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. Penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    3. Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen).
  - b. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

- c. Tahap III sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (13) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c.
  - (3) Pengajuan permohonan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
  - (2) Prioritas Dana Desa dimaksud ayat (1), termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berupa :
    - a. Kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan atau
    - b. Jaringan pengaman social di desa.
  - (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 15 A dan Pasal 15 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Jaring pengaman sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dana Desa.

- (4) Calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar :
  - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
  - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) Bulan paling cepat Bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 15B

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) dan ayat (3) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat Rancangan Peraturan Desa Mengenai APBDes.

10. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data komulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
  - (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember.
  - (6) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menteri keuangan memperhitungkan sisa dana desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Hagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
  - (8) Dalam hal sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020.
  - (9) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
13. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai :

- a. Format Laporan realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2);
- b. Format Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- c. Format Laporan Konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) serta Pasal 14 ayat (2);

- d. Format Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (5);
- e. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 11; dan
- f. Format Laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A dan Pasal 14 A.

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemohon penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 :

- a. yang telah disampaikan kepala Desa kepada Bupati dan/atau diajukan ke KPPN; dan
- b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun perlu penyesuaian/ perbaikan Dokumen,

Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PKM.7/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa .

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 10 Juni 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 65.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS  
NIP19680816 199803 1 007



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PASER**  
**NOMOR .....TAHUN 2020**  
**TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN**  
**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**  
**SETIAP DESA KABUPATEN PASER**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN/DESA	NOMOR REKENING	DANA DESA (DD) TA. 2020 (Rp)	BESARAN PENYALURAN		
				TAHAP I (40%) (Rp)	TAHAP II (40%) (Rp)	TAHAP III (20%) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1</b>	<b>Batu Engau</b>		<b>12,263,933,000</b>	<b>4,961,769,600</b>	<b>4,905,573,200</b>	<b>2,396,590,200</b>
	1 Bai Jaya	0021418960	877,325,000	355,252,800	350,930,000	171,142,200
	2 Kerang Dayo	0021415316	1,079,785,000	436,236,800	431,914,000	211,634,200
	3 Mengkudu	0021404888	861,311,000	348,847,200	344,524,400	167,939,400
	4 Tampakan	0021406963	727,256,000	295,225,200	290,902,400	141,128,400
	5 Petangis	0021404932	948,393,000	383,680,000	379,357,200	185,355,800
	6 Tebru Paser Damai	0021419044	781,403,000	316,884,000	312,561,200	151,957,800
	7 Kerang	0021404849	1,515,630,000	610,574,800	606,252,000	298,803,200
	8 Riwang	0021404914	1,279,504,000	516,124,400	511,801,600	251,578,000
	9 Lomu	0021404856	920,950,000	372,702,800	368,380,000	179,867,200
	10 Pengguren Jaya	0021419079	801,183,000	324,796,000	320,473,200	155,913,800
	11 Saing Prupuk	0021419036	781,801,000	317,043,200	312,720,400	152,037,400
	12 Langgai	0021404927	841,373,000	340,872,000	336,549,200	163,951,800
	13 Segendang	0021404867	848,019,000	343,530,400	339,207,600	165,281,000
<b>2</b>	<b>Batu Sopang</b>		<b>7,506,337,000</b>	<b>3,041,440,000</b>	<b>3,002,534,800</b>	<b>1,462,362,200</b>
	1 Songka	0021400131	830,281,000	336,435,200	332,112,400	161,733,400
	2 Legai	0021404798	748,177,000	303,593,600	299,270,800	145,312,600
	3 Sungai Terik	0021404809	777,499,000	315,322,400	310,999,600	151,177,000
	4 Busui	0021404775	889,439,000	360,098,400	355,775,600	173,565,000
	5 Kasungai	0021404816	832,042,000	337,139,600	332,816,800	162,085,600
	6 Rantau Buta	0021404829	827,415,000	335,288,800	330,966,000	161,160,200
	7 Rantau Layung	0021404832	854,200,000	346,002,800	341,680,000	166,517,200
	8 Samuranggau	0021404768	799,874,000	324,272,400	319,949,600	155,652,000
	9 Batu Kajang	0021404785	947,410,000	383,286,800	378,964,000	185,159,200
<b>3</b>	<b>Kuaro</b>		<b>9,960,986,000</b>	<b>4,036,268,000</b>	<b>3,984,394,400</b>	<b>1,940,323,600</b>
	1 Klempang Sari	0021408382	855,890,000	346,678,800	342,356,000	166,855,200
	2 Keluang Paser Jaya	0021400706	778,507,000	315,725,600	311,402,800	151,378,600
	3 Pasir Mayang	0021405215	1,098,736,000	443,817,200	439,494,400	215,424,400
	4 Harapan Baru	0021405183	863,781,000	349,835,200	345,512,400	168,433,400
	5 Kerta Bumi	0021406373	785,890,000	318,678,800	314,356,000	152,855,200
	6 Lolo	0021405157	767,076,000	311,153,200	306,830,400	149,092,400
	7 Sandeley	0021405179	835,268,000	338,430,000	334,107,200	162,730,800
	8 Pondang Baru	0021415260	809,799,000	328,242,400	323,919,600	157,637,000
	9 Kendarom	0021417386	738,943,000	299,900,000	295,577,200	143,465,800
	10 Padang Jaya	0021416274	764,483,000	310,116,000	305,793,200	148,573,800
	11 Modang	0021405208	845,453,000	342,504,000	338,181,200	164,767,800
	12 Rangan	0021405194	817,160,000	331,186,800	326,864,000	159,109,200
<b>4</b>	<b>Long Ikis</b>		<b>21,248,568,000</b>	<b>8,607,497,200</b>	<b>8,499,427,200</b>	<b>4,141,643,600</b>
	1 Tajer Mulya	0021418391	835,974,000	338,712,400	334,389,600	162,872,000
	2 Pait	0021405273	787,304,000	319,244,400	314,921,600	153,138,000
	3 Krayan Makmur	0021406999	935,958,000	378,706,000	374,383,200	182,868,800
	4 Lombok	0021405260	770,527,000	312,533,600	308,210,800	149,782,600
	5 Jemparing	0021405300	811,922,000	329,091,600	324,768,800	158,061,600
	6 Adang Jaya	0021415359	812,061,000	329,147,200	324,824,400	158,089,400
	7 Teluk Waru	0021405239	753,691,000	305,799,200	301,476,400	146,415,400
	8 Samuntai	0021405257	851,137,000	344,777,600	340,454,800	165,904,600
	9 Kayungo	0021405315	740,538,000	300,538,000	296,215,200	143,784,800
	10 Krayan Jaya	0021406970	761,661,000	308,987,200	304,664,400	148,009,400
	11 Kerta Bhakti	0021407033	902,125,000	365,172,800	360,850,000	176,102,200
	12 Brewe	0021400084	750,553,000	304,544,000	300,221,200	145,787,800
	13 Bukit Saloka	0021406357	813,635,000	329,776,800	325,454,000	158,404,200
	14 Krayan Sentosa	0021406982	959,211,000	388,007,200	383,684,400	187,519,400
	15 Kayungo Sari	0021407000	781,656,000	316,985,200	312,662,400	152,008,400
	16 Belimbing	0021405331	777,140,000	315,178,800	310,856,000	151,105,200
	17 Tajur	0021405240	907,040,000	367,138,800	362,816,000	177,085,200
	18 Tiwei	0021405322	741,001,000	300,723,200	296,400,400	143,877,400
	19 Long Gelang	0021405340	753,088,000	305,558,000	301,235,200	146,294,800
	20 Krayan Bahagia	0021407015	905,669,000	366,590,400	362,267,600	176,811,000
	21 Sawit Jaya	0021407024	787,630,000	319,374,800	315,052,000	153,203,200
	22 Sekurou Jaya	0021406360	769,646,000	312,181,200	307,858,400	149,606,400
	23 Olung	0021405290	819,053,000	331,944,000	327,621,200	159,487,800
	24 Muara Adang	0021405226	1,663,973,000	669,912,000	665,589,200	328,471,800
	25 Atang Pait	0021419028	856,375,000	346,872,800	342,550,000	166,952,200

<b>5</b>	<b>Long Kali</b>		<b>20,227,504,000</b>	<b>8,177,457,600</b>	<b>8,091,001,600</b>	<b>3,959,044,800</b>
1	Gunung Putar	0021418978	737,162,000	299,187,600	294,864,800	143,109,600
2	Bente Tualan	0021405492	871,568,000	352,950,000	348,627,200	169,990,800
3	Muara Adang II	0021417424	743,917,000	301,889,600	297,566,800	144,460,600
4	Perkuwen	0021405548	836,605,000	338,964,800	334,642,000	162,998,200
5	Muara Pias	0021405526	928,679,000	371,471,600	371,471,600	185,735,800
6	Muara Telake	0021405466	953,126,000	385,573,200	381,250,400	186,302,400
7	Pinang Jatus	0021405555	949,122,000	383,971,600	379,648,800	185,501,600
8	Sebakung Taka	0021415332	845,138,000	342,378,000	338,055,200	164,704,800
9	Sebakung	0021405475	1,489,756,000	600,225,200	595,902,400	293,628,400
10	Mendik Karya	0021407051	810,671,000	324,268,400	324,268,400	162,134,200
11	Mendik Bhakti	0021407062	779,098,000	315,962,000	311,639,200	151,496,800
12	Muara Toyu	0021405539	1,034,216,000	418,009,200	413,686,400	202,520,400
13	Mendik	0021405500	1,075,700,000	434,602,800	430,280,000	210,817,200
14	Mendik Makmur	0021406385	1,033,244,000	417,620,400	413,297,600	202,326,000
15	Maruat	0021417416	776,199,000	314,802,400	310,479,600	150,917,000
16	Putang	0021419001	751,286,000	304,837,200	300,514,400	145,934,400
17	Munggu	0021405517	888,874,000	359,872,400	355,549,600	173,452,000
18	Muara Lambakan	0021405560	1,203,665,000	485,788,800	481,466,000	236,410,200
19	Makmur Jaya	0021400122	804,778,000	326,234,000	321,911,200	156,632,800
20	Kepala Telake	0021405573	1,058,045,000	427,540,800	423,218,000	207,286,200
21	Sebakung Makmur	0021417394	801,883,000	325,076,000	320,753,200	156,053,800
22	Petiku	0021417408	854,772,000	346,231,600	341,908,800	166,631,600
<b>6</b>	<b>Muara Komam</b>		<b>10,515,924,000</b>	<b>4,258,243,200</b>	<b>4,206,369,600</b>	<b>2,051,311,200</b>
1	Muara Payang	0021405433	806,255,000	326,824,800	322,502,000	156,928,200
2	Long Sayo	0021405424	789,767,000	320,229,600	315,906,800	153,630,600
3	Binangon	0021405392	833,508,000	337,726,000	333,403,200	162,378,800
4	Muara Langon	0021405387	946,676,000	382,993,200	378,670,400	185,012,400
5	Prayon	0021405415	782,842,000	317,459,600	313,136,800	152,245,600
6	Uko	0021405368	761,977,000	309,113,600	304,790,800	148,072,600
7	Muara Kuaro	0021405400	904,201,000	366,003,200	361,680,400	176,517,400
8	Lusan	0021405440	1,162,653,000	469,384,000	465,061,200	228,207,800
9	Swan Slutung	0021405455	1,026,375,000	414,872,800	410,550,000	200,952,200
10	Sekuan Makmur	0021417335	850,067,000	344,349,600	340,026,800	165,690,600
11	Batu Butok	0021405355	822,687,000	333,397,600	329,074,800	160,214,600
12	Selerong	0021418404	828,916,000	335,889,200	331,566,400	161,460,400
<b>7</b>	<b>Muara Samu</b>		<b>7,315,229,000</b>	<b>2,964,996,800</b>	<b>2,926,091,600</b>	<b>1,424,140,600</b>
1	Rantau Bintungan	0021404759	786,085,000	318,756,800	314,434,000	152,894,200
2	Luan	0021404717	790,844,000	320,660,400	316,337,600	153,846,000
3	Muara Andeh	0021417271	825,583,000	334,556,000	330,233,200	160,793,800
4	Suweto	0021404724	779,763,000	316,228,000	311,905,200	151,629,800
5	Tanjung Pinang	0021404683	756,051,000	306,743,200	302,420,400	146,887,400
6	Muser	0021404731	880,182,000	356,395,600	352,072,800	171,713,600
7	Rantau Atas	0021404698	901,468,000	364,910,000	360,587,200	175,970,800
8	Biu	0021404748	777,484,000	315,316,400	310,993,600	151,174,000
9	Libur Dinding	0021404706	817,769,000	331,430,400	327,107,600	159,231,000
<b>8</b>	<b>Pasir Belengkong</b>		<b>12,915,621,000</b>	<b>5,231,090,400</b>	<b>5,166,248,400</b>	<b>2,518,282,200</b>
1	Suatang	0021404972	746,120,000	302,770,800	298,448,000	144,901,200
2	Suliliran	0021404984	1,118,014,000	451,528,400	447,205,600	219,280,000
3	Suatang Keteban	0021400076	754,754,000	306,224,400	301,901,600	146,628,000
4	Keresik Bura	0021405035	793,045,000	321,540,800	317,218,000	154,286,200
5	Laburan	0021405015	1,006,305,000	406,844,800	402,522,000	196,938,200
6	Damit	0021404967	942,209,000	381,206,400	376,883,600	184,119,000
7	Olong Pinang	0021418358	768,194,000	311,600,400	307,277,600	149,316,000
8	Sunge Batu	0021418374	870,624,000	352,572,400	348,249,600	169,802,000
9	Laburan Baru	0021406340	834,209,000	338,006,400	333,683,600	162,519,000
10	Pasir Belengkong	0021404995	924,925,000	374,292,800	369,970,000	180,662,200
11	Lempesu	0021404941	789,183,000	319,996,000	315,673,200	153,513,800
12	Sangkuriman	0021405002	757,416,000	307,289,200	302,966,400	147,160,400
13	Suliliran Baru	0021405028	1,006,940,000	407,098,800	402,776,000	197,065,200
14	Bekoso	0021404952	758,378,000	307,674,000	303,351,200	147,352,800
15	Seniung Jaya	0021407046	845,305,000	342,444,800	338,122,000	164,738,200

<b>9</b>	<b>Tanah Grogot</b>		<b>13,356,862,000</b>	<b>5,407,586,800</b>	<b>5,342,744,800</b>	<b>2,606,530,400</b>
1	Tepian Batang	0021405053	828,080,000	335,554,800	331,232,000	161,293,200
2	Muara Pasir	0021405135	1,078,604,000	435,764,400	431,441,600	211,398,000
3	Jone	0021405117	849,400,000	344,082,800	339,760,000	165,557,200
4	Janju	0021405040	776,143,000	314,780,000	310,457,200	150,905,800
5	Sungai Langir	0021417378	839,757,000	340,225,600	335,902,800	163,628,600
6	Perepat	0021415383	813,282,000	329,635,600	325,312,800	158,333,600
7	Senaken	0021419010	817,262,000	331,227,600	326,904,800	159,129,600
8	Tapis	0021418986	766,184,000	310,796,400	306,473,600	148,914,000
9	Pulau Rantau	0021417360	1,288,237,000	519,617,600	515,294,800	253,324,600
10	Padang Pengrapat	0021405148	900,027,000	364,333,600	360,010,800	175,682,600
11	Rantau Panjang	0021405120	762,206,000	309,205,200	304,882,400	148,118,400
12	Sempulang	0021405108	757,701,000	307,403,200	303,080,400	147,217,400
13	Tanah Periuk	0021405064	920,625,000	372,572,800	368,250,000	179,802,200
14	Pepara	0021405071	805,288,000	326,438,000	322,115,200	156,734,800
15	Sungai Tuak	0021405081	1,154,066,000	465,949,200	461,626,400	226,490,400
<b>10</b>	<b>Tanjung Harapan</b>		<b>9,907,010,000</b>	<b>3,988,740,800</b>	<b>3,962,804,000</b>	<b>1,955,465,200</b>
1	Senipah	0021417351	1,012,808,000	409,446,000	405,123,200	198,238,800
2	Tanjung Aru	0021404899	1,376,820,000	550,728,000	550,728,000	275,364,000
3	Lori	0021415324	1,868,449,000	751,702,400	747,379,600	369,367,000
4	Keladen	0021404870	1,433,554,000	577,744,400	573,421,600	282,388,000
5	Labuankallo	0021415341	1,617,432,000	651,295,600	646,972,800	319,163,600
6	Selengot	0021415375	1,707,850,000	687,462,800	683,140,000	337,247,200
7	Random	0021417343	890,097,000	360,361,600	356,038,800	173,696,600
<b>Jumlah</b>			<b>125,217,974,000</b>	<b>50,675,090,400</b>	<b>50,087,189,600</b>	<b>24,455,694,000</b>

**BUPATI PASER,**

**YUSRIANSYAH SYARKAWI**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007